

DAMPAK EKONOMI DAN RISIKO PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA

Sahat Aditua Fandhitya Silalahi

19

Abstrak

Presiden Jokowi telah mengumumkan rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Provinsi Kalimantan Timur. Pemindahan IKN ini harus direncanakan dengan matang karena terdapat potensi dampak positif beserta risiko. Latar belakang pemindahan IKN adalah beban DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat bisnis sudah terlampau tinggi. Pemindahan IKN juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Oleh karena itu tulisan ini akan menganalisis dampak ekonomi beserta risiko pemindahan IKN yang harus diantisipasi pemerintah. Dalam aspek ekonomi, terdapat potensi peningkatan PDB disertai dengan tingkat inflasi yang terkendali. Namun demikian terdapat risiko pembiayaan yang bersumber dari APBN, BUMN, badan usaha, dan pihak swasta. Pemerintah harus memperhatikan skema kerja sama dengan pihak tersebut mengingat pembangunan sebuah 'kota baru' beserta infrastrukturnya memiliki risiko yang tinggi. Selain itu terdapat potensi inflasi lebih dari perkiraan yang bersumber dari kenaikan harga lahan. DPR RI memantau perkembangan rencana pemindahan IKN melalui mekanisme fungsi pengawasan.

Pendahuluan

Presiden Joko Widodo pada tanggal 26 Agustus 2019 mengumumkan pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai langkah awal, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah melakukan sejumlah kajian terkait tahapan pemindahan IKN. Bappenas mempertimbangkan sejumlah faktor antara lain dampak ekonomi, kesiapan wilayah, dan kemungkinan pengembangan kawasan industri.

Pemerintah mengemukakan alasan utama dari pemindahan IKN

keluar Pulau Jawa adalah pemerataan ekonomi. Aktivitas pemerintahan dan bisnis yang berpusat di Pulau Jawa khususnya DKI Jakarta, telah menghambat pertumbuhan pusat-pusat perekonomian baru di luar Pulau Jawa. Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menambahkan bahwa kesenjangan daerah secara agregat telah menghambat angka pertumbuhan ekonomi secara nasional. Dengan rencana pemindahan IKN, pemerintah berharap dapat mengakselerasi pemerataan ekonomi sekaligus mengurangi kesenjangan



antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa.

Beberapa negara sudah melakukan pemindahan IKN di antaranya Brazil yang memindahkan ibu kotanya dari Rio de Janeiro ke Brasilia dan Australia yang memindahkan ibu kotanya dari Sydney ke Canberra (Kompas, 27 Agustus 2019). Alasan utama dari pemindahan IKN di dua negara tersebut adalah membagi beban kota sebagai pusat bisnis dan pusat pemerintahan sekaligus mengurangi kepadatan penduduk (Koran Tempo, 15 Agustus 2019). Contoh kasus pemindahan IKN di Brazil menunjukkan tidak terdapat kerugian ekonomi yang terjadi di Rio de Janeiro sekaligus tercapainya peningkatan pertumbuhan ekonomi di Brasilia (Bappenas, 26 Juni 2019).

Di sisi lain ada beberapa risiko dari pemindahan IKN keluar Pulau Jawa. Risiko terutama terkait dengan kesiapan daerah tujuan dalam aspek infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Dari aspek pembiayaan, walaupun pemerintah sudah menyatakan hanya 19,2% dari total kebutuhan anggaran Rp446 triliun ditanggung oleh APBN, namun terdapat risiko penambahan beban anggaran negara apabila terjadi kegagalan pembangunan yang dilakukan oleh pihak swasta. Oleh karena itu tulisan ini akan membahas dampak ekonomi dan antisipasi risiko dalam proses pemindahan IKN.

Ketimpangan Ekonomi Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa

Ketimpangan ekonomi merupakan dampak dari tingginya disparitas pembangunan antar-wilayah. Ketimpangan ekonomi

dalam suatu negara bila tidak segera disikapi dengan kebijakan yang tepat akan berdampak kepada permasalahan multidimensi. Urgensi mengatasi ketimpangan semakin penting bila dikaitkan dengan kecenderungan bahwa sebuah wilayah yang sudah lebih maju akan mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi dibandingkan wilayah yang masih tertinggal. Oleh karena itu, pemerintah, baik di negara yang menganut sistem perekonomian pasar maupun terpusat akan mengarahkan pembangunan untuk mengurangi disparitas antar wilayah (Nurzaman, 2012). Dengan semakin kecilnya disparitas antar wilayah, maka potensi percepatan pertumbuhan ekonomi secara nasional akan semakin tinggi.

Ketimpangan antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa terjadi pada banyak aspek. Dari aspek populasi, jumlah penduduk di Pulau Jawa mencapai 56,56% dari total penduduk Indonesia. Di sisi lain jumlah penduduk yang menempati wilayah selain Pulau Jawa berada di bawah angka 10% (kecuali penduduk Sumatera sebesar 21,78%). Besarnya populasi menyebabkan daya dukung Pulau Jawa semakin menurun, terutama dalam hal penyediaan lahan dan air bersih. Khusus untuk DKI Jakarta, kemacetan dan kurangnya akses transportasi publik menyebabkan kerugian ekonomi sebesar Rp56 triliun per tahun (Bappenas, 26 Juni 2019).

Dari aspek ekonomi, sebesar 58,49% kontribusi Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) nasional disumbang oleh Pulau Jawa, di mana wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya menyumbang sebesar 20,85%. Ironisnya, wilayah lain hanya

mampu berkontribusi kurang dari separuh kontribusi PDRB dari Pulau Jawa. Kontribusi ini juga berbanding lurus dengan laju pertumbuhan ekonomi di mana Pulau Jawa mencatat angka 5,61% pada tahun 2017; lebih tinggi dibandingkan mayoritas wilayah lain di Indonesia (Bappenas, 26 Juni 2019). Kontribusi PDRB dan pertumbuhan ekonomi dari wilayah di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1.

Besarnya PDRB di Pulau Jawa tidak terlepas dari keberadaan industri dan bisnis yang sudah lama terbangun. Menurut data Badan Pusat Statistik pada triwulan-I 2019 secara nasional Pulau Jawa menyumbang PDRB sebesar 59,03%. (BPS,2019). Khusus untuk DKI Jakarta, pembangunan infrastruktur transportasi seperti jalan tol, *Mass Rapid Transit*, dan *Light Rapid Transit* berperan besar dalam mendorong laju pertumbuhan PDRB (Kompas, 5 Mei 2019). Keberadaan industri dan infrastruktur tersebut akan membawa dampak langsung terhadap percepatan peningkatan pendapatan masyarakat.

Konsep pertumbuhan menekankan bahwa pusat perekonomian tidak akan muncul secara alami. Pusat pertumbuhan ekonomi baru tidak akan muncul tanpa dorongan inovasi dan teknologi oleh perusahaan/industri yang beraglomerasi di suatu wilayah. Skema *hinterland* memungkinkan sebuah wilayah yang sudah stabil

dapat memberikan dampak ekonomi kepada wilayah yang berlokasi di sekitarnya (Fleisher, et. al, 2010). Teori inilah yang menjelaskan perkembangan ekonomi di wilayah penyangga DKI Jakarta dan Pulau Jawa secara umum semakin cepat dibandingkan wilayah lain. Dengan demikian pemerintah harus mengintervensi percepatan pertumbuhan yang terlalu berpusat di DKI Jakarta dan Pulau Jawa dengan cara pemindahan IKN dan membentuk wilayah pertumbuhan ekonomi baru.

Dampak Pemindahan IKN Terhadap Perekonomian

Bappenas dalam kajiannya menyatakan bahwa pemindahan IKN akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional dengan prediksi kenaikan PDRB sebesar 0,1%. Bappenas menyatakan bahwa kenaikan PDRB bersumber dari pemanfaatan sumberdaya daya potensial seperti pembukaan lahan untuk keperluan infrastruktur produktif dan pembukaan lapangan kerja bagi sumberdaya manusia terampil yang selama ini belum termanfaatkan. Secara spesifik Bappenas memperhitungkan akan terjadi peningkatan upah tenaga kerja bagi wilayah sekitar yang dicerminkan dengan kenaikan *price of labour* sebesar 1,37% (Bappenas, 26

Tabel 1. Kontribusi PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah di Indonesia

Wilayah	Kontribusi PDRB (%)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
Sumatera	21,66	4,30
Kalimantan	8,20	4,33
Jawa	58,49	5,61
Sulawesi	6,11	6,99
Maluku & Papua	2,43	4,89

Sumber: Bappenas, 2019.

Juni 2019).

Di sisi lain rencana pemindahan IKN juga berdampak terhadap kenaikan inflasi secara nasional. Bambang Brodjonegoro memperkirakan akan terdapat kenaikan inflasi sebesar 0,2% selama proses perpindahan IKN. Kenaikan inflasi berasal dari perbaikan pendapatan masyarakat yang tentunya juga diikuti oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Namun inflasi tersebut diperkirakan tidak akan terlalu mempengaruhi daya beli secara nasional karena kenaikan harga hanya terpusat di lokasi IKN baru dan wilayah sekitarnya (liputan6.com, 26 Juni 2019).

Untuk memastikan perkembangan IKN baru, Bappenas merencanakan akan memberikan insentif bagi pelaku usaha untuk berinvestasi. Bambang Brodjonegoro memperkirakan secara nasional akan terjadi peningkatan arus perdagangan sebesar 50% sebagai dampak pertumbuhan kawasan industri di IKN yang terhubung dengan wilayah lain di Indonesia (antaranews.com, 19 Juli 2019). Momentum penambahan porsi investasi dan perdagangan selayaknya dibarengi dengan kebijakan prioritas hilirisasi industri. Dengan demikian akan tercipta lapangan pekerjaan yang dapat

meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus meningkatkan PDRB lokal.

Dengan bauran kebijakan tersebut, pemindahan IKN diprediksi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional dengan tingkat inflasi yang terjaga. Secara agregat kesejahteraan masyarakat di lokasi IKN baru akan meningkat dan berpotensi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa.

Risiko Pemindahan IKN

Selain potensi ekonomi, pemindahan IKN juga memiliki risiko yang harus diantisipasi oleh Pemerintah. Risiko pertama terkait pembiayaan dari keperluan pemindahan IKN. Bappenas memperhitungkan bahwa ada dua skenario kebutuhan total pembiayaan berdasar desain dari IKN, yaitu sebesar Rp466 Triliun dan Rp323 Triliun. Skenario kebutuhan pembiayaan sangat bergantung kepada fungsi pemerintahan dan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan dipindahkan (Bappenas, 26 Juni 2019). Kebutuhan pembiayaan meliputi pembangunan fungsi utama, fungsi pendukung, fungsi penunjang, dan pengadaan lahan. Dua skenario kebutuhan pembiayaan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Kebutuhan Pembiayaan dari Pembangunan IKN Baru

No	Kebutuhan Infrastruktur	Skenario I (Rp triliun)	Skenario II (Rp triliun)
1	Fungsi Utama: Gedung legislatif, eksekutif, dan yudikatif	32,7	20
2	Fungsi Pendukung: Gedung dan rumah ASN/Polri/TNI, fasilitas pendidikan dan kesehatan	265,1	182,2
3	Fungsi Penunjang: fasilitas sarana dan prasarana	160,2	114,8
4	Kebutuhan Pengadaan Lahan	8	6
Total		466	323

Sumber : Bappenas, 2019.

Proyek pembangunan 'kota baru' menuntut penyediaan infrastruktur yang masif. Karakteristik proyek infrastruktur adalah memiliki risiko jangka panjang terutama berasal dari kinerja proyek yang belum tentu sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. Di sisi lain pihak swasta tentu mengharapkan realisasi keuntungan yang sesuai dengan kalkulasi di awal proyek. Dengan prinsip pembagian risiko, pemerintah harus benar-benar memperhatikan perjanjian kerja sama dengan pihak badan usaha atau swasta sehingga kualitas IKN baru beserta infastruktur pendukung dapat sesuai dengan spesifikasi yang mendukung jalannya pemerintahan dan tidak lagi memberikan beban tambahan bagi APBN.

Sementara dari sisi makro, Ikatan Pengusaha *Real Estate* Indonesia (REI) memperkirakan kenaikan inflasi akan lebih besar daripada perhitungan Bappenas. REI memperkirakan kontribusi inflasi terbesar berasal dari kenaikan harga lahan, apalagi terdapat luasan lahan yang dikuasai hanya oleh beberapa pihak (kaltim.tribunnews.com, 21 Agustus 2019). Keberadaan para spekulan juga dapat memperbesar kemungkinan meningkatnya harga lahan secara tidak terkendali. Untuk mengantisipasi hal ini pemerintah harus merencanakan lokasi dan tata ruang wilayah secara tepat disertai dengan pengadaan yang sedapat mungkin berasal dari lahan yang dikuasai negara atau BUMN. Penggunaan lahan tersebut dapat dilakukan dengan skema pendayagunaan aset yang tidak membebani anggaran negara.

Dengan demikian risiko tingginya inflasi yang berasal dari kenaikan harga lahan dapat diminimalisir.

Penutup

Pemindahan IKN berangkat dari kenyataan bahwa ibu kota saat ini sudah menanggung beban sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat bisnis. Pemindahan IKN memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan tingkat inflasi yang tetap rendah. Selain itu pertumbuhan wilayah industri dengan rantai nilai hingga hilir akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada gilirannya akan menurunkan ketimpangan ekonomi antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa.

Pemindahan IKN juga memiliki risiko terutama bersumber dari kebutuhan pembiayaan. Skema pembiayaan untuk pembangunan 'kota baru' beserta infastrukturnya memiliki risiko jangka panjang apalagi sebagai pusat pemerintahan. Pemerintah selayaknya memperhatikan aspek perencanaan dan tata ruang wilayah sehingga penggunaan lahan dapat efektif dan meminimalisir kemungkinan inflasi dari kenaikan harga lahan yang tidak terkendali. DPR RI secara berkelanjutan harus memantau perkembangan pembangunan IKN baru melalui mekanisme pengawasan yang melibatkan Komisi V (infrastruktur), Komisi XI (keuangan), dan komisi terkait lainnya.

Referensi

Antarnews.com. (19 Juli 2019). "Pemindahan Ibu Kota", <https://www.antarnews.com/berita/965428/pemindahan-ibu-kota-ke-kalimantan-diyakini-tingkatkan-arus-perdagangan>, diakses 22 Agustus 2019.

- Badan Pusat Statistik, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2019, Berita Resmi Statistik, No. 39/05/Th.XXII, 6 Mei 2019.
- Bappenas, "Dampak Ekonomi dan Skema Pembiayaan Pemindahan Ibu Kota Negara", Paparan dalam Dialog Nasional II: Menuju Ibu Kota Masa Depan: Smart, Green, and Beautiful, 26 Juni 2019.
- Fleisher B., Li H., Zhao, M.Q. (2010). "Human Capital, Economic Growth, and Regional Inequality in China", *Journal of Development Economics*, Vol. 92, Issue 2, pp. 215-231.
- Hartati, Enny Sri. (2019). "Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara", *Kompas*, 27 Agustus 2019, hal.1.
- "Ide Jokowi Soal Metropolitan Baru di Luar Jawa Dorong Sektor Properti", *Kompas*, 5 Mei 2019, hal. 5.
- Liputan6.com (26 Juni 2019). "Pemindahan Ibu Kota Dongkrak Inflasi 2%", <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3998755/pemindahan-ibu-kota-dongkrak-inflasi-02-persen?>, diakses 21 Agustus 2019.
- "Negara-Negara yang Mengalami Relokasi Ibu Kota", *Koran Tempo*, 15 Agustus 2019, hal. 3.
- Nurzaman, S. S.. (2012). *Perencanaan wilayah dalam konteks Indonesia*. Bandung: Penerbit IITB.
- Tribunnews.com. (21 Agustus 2019). "Pemindahan Ibu Kota", <https://kaltim.tribunnews.com/2019/08/21/pemindahan-ibu-kota-rei-kaltim-khawatir-inflasi-tinggi-bisa-gagalkan-penetapan-lokasi-ibu-kota-baru>, diakses 21 Agustus 2019.



Sahat Aditua Fandhitya Silalahi
sahat.silalahi@dpr.go.id.

Sahat Aditua F Silalahi, ST, MBA, menyelesaikan pendidikan S-1 di Teknik Kimia, Institut Teknologi Bandung pada Tahun 2004. Kemudian memperoleh gelar *Master of Business Administration* (MBA) dari Universitas Gadjah Mada pada Tahun 2009. Selama bekerja di Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI, aktif bertugas dalam Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan RUU tentang Perindustrian, serta Panitia Khusus Angket DPR RI tentang Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II). Beberapa tulisan yang pernah dipublikasikan antara lain : *Factors Affecting Satisfaction and Loyalty Toward Islamic Banking* (*Atlantis Press, Web of Science Indexed*, 2019) , *Isu Strategis pada Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara* (2016), dan *Permasalahan Pada Industri Manufaktur di Indonesia* (2016).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.